

Pemahaman tentang Munculnya Pejuang Teroris Asing Indonesia: Ekonomi Politik, Analisis Pasar, dan Pendekatan Teori Perubahan

Muhammad Hilmy Bramantyo

Global Crime and Justice, University of York, United Kingdom

Korespondensi penulis: m.hilmy.bramantyo@gmail.com

Kata Kunci:

Pejuang teroris asing, analisis ekonomi politik, analisis pasar, teori perubahan

Abstrak

Isu terorisme di Indonesia telah meningkat dari yang awalnya menyebabkan masalah hanya di negara tersebut menjadi menyebar ke negara lain. Kelompok teroris baru ini disebut Pejuang Teroris Asing (PTA). Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis munculnya PTA Indonesia ke Suriah untuk berperang bersama Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dengan menggunakan kerangka teoritis Analisis Ekonomi Politik (AEP), Analisis Pasar (AP), dan Teori Perubahan. Dengan menggunakan AEP, dapat dikemukakan bahwa munculnya PTA Indonesia di tingkat makro, sektoral, dan mikro tidak dapat dihindari. Penggunaan AP juga mendukung munculnya PTA Indonesia dan bagaimana cara untuk campur tangan di dalamnya. Akhirnya, penelitian ini mengemukakan teori perubahan untuk menghentikan aliran PTA Indonesia, yaitu dengan cara upaya pencegahan untuk pendukung PTA Indonesia, berkomunikasi secara efektif dengan orang-orang yang terpengaruh oleh doktrin teroris, dan mengubah budaya dengan mendefinisikan ulang konsep jihad dan menerapkannya dalam kurikulum pendidikan Islam saat ini. Meskipun PTA Indonesia ke Suriah telah berhenti sejak kekalahan ISIS, penelitian ini berpendapat bahwa AEP, AP, dan Teori Perubahan dapat digunakan untuk menganalisis pergerakan masa depan PTA Indonesia dan mengambil langkah-langkah pencegahan terhadapnya.

Dikirimkan: 14 September 2023

Diterima: 20 November 2023

Diterbitkan: 1 Desember 2023

Copyright (c) Author



Untuk mensitasi artikel ini: Bramantyo, M. H. 2023. *Pemahaman tentang Munculnya Pejuang Teroris Asing Indonesia: Ekonomi Politik, Analisis Pasar, dan Pendekatan Teori Perubahan*. *AML CFT Journal* 2(1):83-99, <https://doi.org/10.59593/amlcft.2023.v2i1.147>

Pendahuluan

Terorisme telah menjadi isu yang berkelanjutan di Indonesia. Sejak serangan bom Bali pada tahun 2002 yang menyebabkan adanya korban jiwa dan luka sebanyak 209 orang,¹ serangkaian peristiwa terorisme terus terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir meskipun dengan jumlah korban yang tidak sebanyak serangan sebelumnya. Meskipun terjadi penurunan jumlah korban, terorisme tetap menjadi ancaman signifikan terhadap keamanan Indonesia karena ideologi ekstremis terus berkembang. Ada pandangan ekstrem yang meyakini bahwa Indonesia seharusnya mengadopsi hukum syariah sebagai dasar negara. Pandangan ini dikemukakan oleh para ulama ekstremis dan ini dapat dikatakan selalu menjadi benih terorisme di Indonesia yang menunggu waktu yang tepat untuk tumbuh. Benih kelompok ekstremis baru di Indonesia muncul sejak terbentuknya Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) pada tahun 2014, yang mengusung ideologi khilafah (pemerintahan tunggal atau kerajaan bagi umat Islam di seluruh dunia). Ideologi ini menyebar di kalangan ulama ekstremis Indonesia yang telah membentuk pengajian (kelompok studi Islam) dan menginspirasi beberapa murid atau pengikut mereka untuk melarikan diri ke Suriah untuk menyerang bersama ISIS.² Namun, pergi ke Suriah tidaklah mudah dan memerlukan sejumlah uang. Oleh karena itu, pemimpin ISIS kemudian memerintahkan setiap Muslim untuk melakukan jihad di setiap negara.³ Hasilnya, kelompok teroris yang terinspirasi oleh ISIS seperti Jemaah Anshar Daulat, Mujahidin Indonesia Barat, Mujahidin Indonesia Timur, dan Jemaah Anshar Tawhid muncul dan melakukan tindakan teroris di Indonesia. Berikut adalah kelompok teroris yang bertanggung jawab atas peristiwa teroris di Indonesia dari tahun 2015 hingga 2020, atau sejak ISIS muncul di Suriah pada Juli 2014:

Tabel 1. Daftar Serangan Teroris Tahun 2015-2020 di Indonesia⁴

Pelaku	Jumlah Kematian	Jumlah yang Terluka
Jemaah Anshar Daulat	48	81
Mujahidin Indonesia Timur	21	3
Jemaah Anshar Daulat atau Mujahidin Indonesia Timur	14	36
Darul Islam	5	3
Mujahidin Indonesia Barat	2	0
Jemaah Anshar Daulat atau Jemaah Anshar Tauhid	1	0
Total	91	123

Debat mengenai definisi terorisme telah bergeser dari tindakan kekerasan atas dasar ideologi atau kewarganegaraan menjadi tindakan kekerasan yang dilakukan atas nama agama tertentu, dengan maksud menimbulkan ketakutan di masyarakat dan mengganggu pemerintahan

¹ “Korban Luka Akibat Teror Bom Di Indonesia (2002-2021)”, Y Pusparisa, accessed February, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/03/29/korban-luka-bom-bali-i-yang-terbesar-selama-dua-dekade>

² Kirsten E. Schulze and Joseph Chinyong Liow, “Making Jihadis, Waging Jihad: Transnational and Local Dimensions of the ISIS Phenomenon in Indonesia and Malaysia,” *Asian Security* 15, no. 2 (May 4, 2019): 122–39, <https://doi.org/10.1080/14799855.2018.1424710>; Didik Novi Rahmanto, Adrianus Eliasta Meliala, and Ferdinand Andi Lolo, “Ideology Deconstruction of Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) Returnees in Indonesia,” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 10, no. 2 (December 21, 2020): 381–408, <https://doi.org/10.18326/ijims.v10i2.381-408>.

³ Schulze and Liow, “Making Jihadis, Waging Jihad.”

⁴ Global Terrorism Database, “Global Terrorism Database,” *Global Terrorism Database*, accessed March 23, 2023, <https://www.start.umd.edu/gtd/search/Results.aspx?search=iNDONESIA&sa.x=0&sa.y=0>.

yang sah.⁵ Namun, definisi terorisme harus merujuk pada Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1566 (2004), yang menjelaskan terorisme sebagai:

Tindakan kriminal, termasuk terhadap warga sipil, yang dilakukan dengan niat menyebabkan kematian atau cedera tubuh serius, atau penyanderaan, dengan tujuan menimbulkan keadaan teror di masyarakat umum atau dalam kelompok orang atau orang tertentu, mengintimidasi suatu populasi, atau memaksa suatu pemerintah atau organisasi internasional untuk melakukan atau menahan diri dari melakukan suatu tindakan.

Sementara itu, Pemerintah Indonesia mendefinisikan terorisme melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, yaitu:

Terorisme adalah tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan niat menciptakan suasana ketakutan atau rasa takut, menyebabkan korban massal, kerusakan atau penghancuran objek-objek vital secara strategis, lingkungan, fasilitas umum, atau fasilitas internasional dengan motif keamanan ideologis, politis, atau lainnya.

Dari kedua definisi di atas, kesamaan definisi tersebut terletak pada bahaya yang ditimbulkan kepada masyarakat akibat kekerasan yang dapat menyebabkan cedera atau bahkan kematian. Namun, para peneliti memiliki rentang perdebatan yang luas mengenai definisi terorisme. Stampnitzky (2017) berpendapat bahwa terorisme seharusnya terkait dengan tiga elemen kunci, di mana terorisme didefinisikan sebagai kekerasan yang tidak sah yang dilakukan oleh musuh dengan motif politik.⁶ Sementara itu, Brown⁷ mendefinisikan terorisme sebagai sesuatu yang erat kaitannya dengan tindakan keagamaan, di mana ia membedakan antara 'teroris sekuler' dan 'teroris keagamaan'. Konsekuensi dari teori Brown adalah bahwa terorisme selalu terkait dengan pandangan keagamaan dan non-keagamaan. Namun, Gofas⁸ berpendapat bahwa bentuk terorisme lebih kompleks daripada hanya memisahkan antara pandangan keagamaan dan non-keagamaan. Gofas memperkenalkan konsep jenis terorisme lama dan baru dengan membaginya menjadi lima elemen, seperti yang ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. Perbedaan antara Terorisme “Lama” dan Terorisme “Baru”⁹

Elemen	“Old” Terrorism	“New” Terrorism
Struktur organisasi	Hierarki	Mengandalkan Jaringan
Operasional	Dalam wilayah asal	Di luar wilayah asal
Jangkauan	Orientasi teritorial	Orientasi transnasional
Motif	Ideologi Politik/Nasionalis	Fanatisme Agama
Taktik	Kekerasan yang Terkendali	Kekerasan Ekstrem
Sikap terhadap Sistem Westphalia	Penegasan Sistem	Mengancam Sistem

⁵ Douglas Pratt, “Religion and Terrorism: Christian Fundamentalism and Extremism,” *Terrorism and Political Violence* 22, no. 3 (June 15, 2010): 438–56, <https://doi.org/10.1080/09546551003689399>; Daniel Masters, “The Origin of Terrorist Threats: Religious, Separatist, or Something Else?,” *Terrorism and Political Violence* 20, no. 3 (July 2008): 396–414, <https://doi.org/10.1080/09546550802073359>.

⁶ L Stampnitzky, “Can Terrorism Be Defined?,” in *Constructions of Terrorism: An Interdisciplinary Approach to Research and Policy*, by M Stohl, R Burchill, and S Englund (University of California Press, 2017), 11–20.

⁷ C Brown, “The New Terrorism Debate,” *Alternatives: Turkish Journal of International Relations* 6, no. 3 & 4 (2007): 28–43.

⁸ A Gofas, “‘Old’ vs. ‘New’ Terrorism: What’s in a Name?,” *International Relations Council of Turkey* 8, no. 32 (2012): 17–32, <https://www.jstor.org/stable/43926201?sid=primo>.

⁹ Ibid., 21

Menurut Tabel 2, jangkauan operasional terorisme "baru" dapat meluas di luar zona konflik, yang berarti dapat melibatkan aliran lintas batas pejuang teroris asing (PTA), yang menjadi fokus aliran dalam tulisan ini. Menurut Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2178 (2014), PTA adalah seseorang:

yang melakukan perjalanan atau berupaya melakukan perjalanan ke negara selain negara tempat mereka tinggal atau memiliki kewarganegaraan, dan individu lain yang melakukan perjalanan atau berupaya melakukan perjalanan dari wilayah mereka ke negara selain negara tempat mereka tinggal atau memiliki kewarganegaraan, dengan tujuan melakukan, merencanakan, atau mempersiapkan diri untuk atau berpartisipasi dalam tindakan terorisme, atau memberikan atau menerima pelatihan teroris.

Selanjutnya, Hegghammer¹⁰ mendefinisikan PTA sebagai seseorang yang bergabung dalam suatu konflik, tidak memiliki kewarganegaraan dengan negara lawan, tidak memiliki afiliasi dengan kekuatan militer, dan tidak dibayar oleh entitas manapun. Oleh karena itu, PTA sering menjadi relawan untuk bertempur di medan perang negara lain.

Penelitian ini akan berfokus pada aliran PTA Indonesia ke Suriah untuk berperang bersama ISIS. Dengan menggunakan metode kualitatif dan kerangka analisis ekonomi politik (AEP) dan analisis pasar (AP) dari Global Initiative against Transnational Organized Crime (GI-TOC), tujuan utama penelitian ini adalah untuk mencari penjelasan kemunculan PTA Indonesia dengan menggunakan AEP dan AP, meneliti dampaknya, dan menentukan metode untuk intervensi menggunakan teori perubahan yang diusulkan oleh Midgley, Briscoe, and Bertoli.¹¹

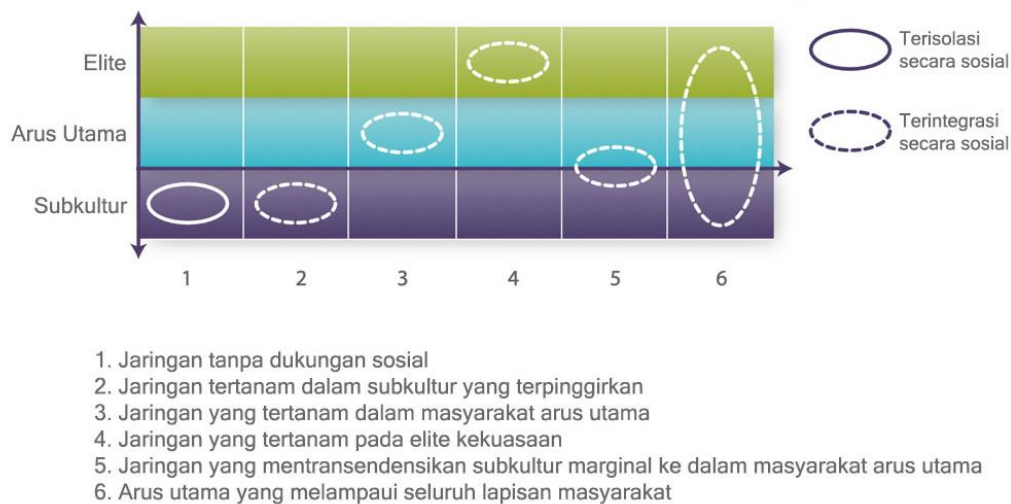
Tulisan ini akan dibagi menjadi lima bagian, termasuk pengantar. Setelah menjelaskan latar belakang aliran PTA Indonesia ke Suriah, bagian kedua akan membahas AEP antara Indonesia dan Suriah yang mendorong PTA Indonesia ke Suriah. Setelah itu, bagian ketiga menguji AP pada biaya untuk PTA Indonesia berangkat ke Suriah, masuk pasar yang menjelaskan persyaratan untuk direkrut sebagai PTA, kekerasan yang terjadi di antara PTA, perlindungan ISIS dari pemerintah Suriah, dan legitimasi PTA oleh ulama ekstremis Indonesia. Penting juga untuk membahas tingkat kerusakan yang disebabkan oleh PTA Indonesia, baik di Indonesia maupun Suriah, serta prioritas campur tangan yang dibahas dalam bagian keempat. Teori perubahan akan dibahas lebih lanjut dalam bagian kelima di mana teori ini menyediakan solusi yang tepat untuk mengintervensi dan menghindari aliran PTA Indonesia. Bagian terakhir menyimpulkan pembahasan makalah ini.

Analisis Ekonomi Politik (AEP)

Sebelum mengkaji terorisme dan aliran PTA Indonesia, penting untuk memahami posisi organisasi teroris dalam masyarakat Indonesia. Menurut Lampe (2016) kejahatan terorganisir tertanam dalam masyarakat, oleh karena itu kejahatan tidak muncul secara mendadak, tetapi ada katalis dalam masyarakat. Berikut adalah gambaran konstelasi kejahatan terorganisir dalam masyarakat:

¹⁰ T Hegghammer, "The Rise of Muslim Foreign Fighters: Islam and the Globalization of Jihad," *International Security* 35, no. 3 (2010): 53–94, <https://muse.jhu.edu/article/407198>.

¹¹ Tim Midgley, Ivan Briscoe, and Daniel Bertoli, "Identifying Approaches and Measuring Impacts of Programmes Focused on Transnational Organised Crime" (United Kingdom: Department for International Development, May 30, 2014), <https://www.saferworld.org.uk/resources/publications/812-identifying-approaches-and-measuring-impacts-of-programmes-focused-on-transnational-organised-crime>.



Gambar 1. Konstelasi Kriminal Terorganisir Di Masyarakat¹²

Terorisme di Indonesia dapat dikatakan berada pada posisi kedua di mana jaringannya tertanam dalam subkultur yang terpinggirkan. Hadiz and Robison¹³ berpendapat bahwa gagasan terorisme di Indonesia muncul dari perkotaan yang terpinggirkan. Karena Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar, penting untuk membedakan antara Muslim ekstremis (yang mengklaim tindakan teror) dan fundamentalis sebelum membahas penyebab terorisme. Jika tidak, istilah Muslim akan sebagian besar terkait dengan budaya kekerasan dan terorisme. Namun, banyak sarjana seperti Hekmatpour and Burns (2019), Delia Deckard and Jacobson (2015), dan Pratt (2010) cenderung menyatakan bahwa Islam ekstremis dan fundamentalis sama dan memiliki akar yang sama dalam kekerasan dan terorisme.¹⁴ Muslim fundamentalis adalah 'orang yang sungguh-sungguh mempertimbangkan agamanya',¹⁵ sementara ekstremis berarti kelompok tersebut percaya pada ideologi dan menggunakan kekerasan 'untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan'.¹⁶ Dari dua definisi ini, dapat dikemukakan bahwa fundamentalis dan ekstremis memiliki makna yang berbeda. Meskipun kelompok teroris mengklaim bahwa mereka adalah Muslim fundamentalis, motif politik tertanam dalam tindakan teror mereka. Dari titik ini, muncul pemikiran tentang terorisme dan membentuk PTA Indonesia yang hanya tertanam dalam subkultur marginal.

¹² The Global Initiative Against Transnational Organized Crime, "Development Responses to Organised Crime: An Analysis and Programme Framework" (Geneva: The Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2016), <https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2016/04/Development-Responses-to-Organised-Crime.-An-analysis-and-programme-framework.pdf>.

¹³ Vedi R. Hadiz and Richard Robison, "Political Economy and Islamic Politics: Insights from the Indonesian Case," *New Political Economy* 17, no. 2 (April 2012): 137–55, <https://doi.org/10.1080/13563467.2010.540322>.

¹⁴ Pratt, "Religion and Terrorism"; Natalie Delia Deckard and David Jacobson, "The Prosperous Hardliner: Affluence, Fundamentalism, and Radicalization in Western European Muslim Communities," *Social Compass* 62, no. 3 (September 2015): 412–33, <https://doi.org/10.1177/0037768615587827>; Peyman Hekmatpour and Thomas J. Burns, "Perception of Western Governments' Hostility to Islam among European Muslims before and after ISIS: The Important Roles of Residential Segregation and Education," *The British Journal of Sociology* 70, no. 5 (December 2019): 2133–65, <https://doi.org/10.1111/1468-4446.12673>.

¹⁵ M. Taylor and J. Horgan, "The Psychological and Behavioural Bases of Islamic Fundamentalism," *Terrorism and Political Violence* 13, no. 4 (December 2001): 39, <https://doi.org/10.1080/09546550109609699>.

¹⁶ Nele Schils and Antoinette Verhage, "Understanding How and Why Young People Enter Radical or Violent Extremist Groups," application/pdf, *International Journal of Conflict and Violence (IJCIV)*, June 21, 2017, 2.

Setelah mengkaji gagasan tentang terorisme dalam masyarakat, penelitian ini kemudian akan menguji AEP pada tingkat makro, sektoral, dan mikro, baik di Indonesia maupun Suriah. Dari tingkat makro, ditemukan bahwa tekanan di bawah rezim Orde Baru yang dipimpin oleh mantan Presiden Suharto terhadap politik Islam menyebabkan munculnya kelompok teroris di Indonesia.¹⁷ Setelah Suharto dan militer-militer menyingkirkan Partai Komunis pada tahun 1966, rezim Orde Baru berbalik untuk menindas politik Islam karena itulah satu-satunya ideologi yang tersisa yang dianggap sebagai ancaman politik.¹⁸ Tekanan saat rezim Suharto inilah yang menyebabkan lahirnya kelompok teroris bernama Darul Islam yang secara historis selalu berusaha membujuk pemerintah dengan membangun negara syariah sendiri.¹⁹ Kemudian Darul Islam (DI) terbagi menjadi faksi kecil yang disebut Jemaah Islamiyah (JI) yang didirikan pada tahun 1993 oleh Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Baasyir.²⁰ Nama JI menjadi terkenal setelah kelompok ini menghancurkan klub malam di Bali pada tahun 2002 dan mendominasi kasus teror sepuluh tahun kemudian. Sejak ISIS muncul di Suriah, kelompok teroris lain yang mendukung ideologi khilafah ISIS muncul, seperti Jemaah Anshar Daulat, Mujahidin Indonesia Timur, dan Mujahidin Indonesia Barat. Ketiga kelompok ini bertanggung jawab atas aliran PTA Indonesia ke Suriah.

Pada tingkat sektoral, Islamofobia pemerintah Indonesia dapat dianggap sebagai pemicu munculnya kelompok teroris. Sejak serangan bom Bali pada tahun 2002, Islamofobia telah terbentuk di masyarakat. Kondisi ini terjadi karena kelompok teroris Indonesia menggunakan simbol-simbol dan penampilan Islam saat melakukan tindakan teror.²¹ Pemerintahan pasca-Suharto juga mewarisi pandangan melihat gerakan Islam sebagai ancaman politik. Ini terlihat ketika pemerintah Indonesia melarang dua kelompok politik Islam yang disebut Hizbut Tahrir dan Front Pembela Islam masing-masing pada tahun 2017 dan 2020,²² di mana kedua kelompok mendorong penyatuan umat Islam di Indonesia sebagai kelompok politik melawan pemerintah korup.²³

¹⁷ Vedi R. Hadiz, "Towards a Sociological Understanding of Islamic Radicalism in Indonesia," *Journal of Contemporary Asia* 38, no. 4 (November 2008): 638–47, <https://doi.org/10.1080/00472330802311795>; Vedi R. Hadiz and Khoo Boo Teik, "Approaching Islam and Politics from Political Economy: A Comparative Study of Indonesia and Malaysia," *The Pacific Review* 24, no. 4 (September 2011): 463–85, <https://doi.org/10.1080/09512748.2011.596561>.

¹⁸ Hadiz, "Towards a Sociological Understanding of Islamic Radicalism in Indonesia"; John Roosa, *Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto's Coup d'état in Indonesia*, New Perspectives in Southeast Asian Studies (Madison, Wis: University of Wisconsin Press, 2006).

¹⁹ Hadiz and Teik, "Approaching Islam and Politics from Political Economy."

²⁰ Julie Chernov Hwang and Kirsten E. Schulze, "Why They Join: Pathways into Indonesian Jihadist Organizations," *Terrorism and Political Violence* 30, no. 6 (November 2, 2018): 911–32, <https://doi.org/10.1080/09546553.2018.1481309>; S Jones, "New Order Repression and the Birth of Jemaah Islamiyah," in *Soeharto's New Order and Its Legacy: Essays in Honour of Harold Crouch*, by Edward Aspinall and G Fealy (ANU Press, 2010), 39–48.

²¹ Syaza Farhana Mohamad Shukri, "The Perception of Indonesian Youths toward Islamophobia: An Exploratory Study," *Islamophobia Studies Journal* 5, no. 1 (October 1, 2019), <https://doi.org/10.13169/islastudj.5.1.0061>.

²² Syaifudin Zuhri, "Regimented Islamophobia: Islam, State, and Governmentality in Indonesia," *QIJS (Qudus International Journal of Islamic Studies)* 9, no. 2 (December 26, 2021): 387, <https://doi.org/10.21043/qijis.v9i2.8249>; Ihsan Yilmaz, Nicholas Morieson, and Hasnan Bachtiar, "Civilizational Populism in Indonesia: The Case of Front Pembela Islam (FPI)," *Religions* 13, no. 12 (December 12, 2022): 1208, <https://doi.org/10.3390/rel13121208>.

²³ Yilmaz, Morieson, and Bachtiar, "Civilizational Populism in Indonesia"; Zainuddin Syarif, Syafiq A. Mughni, and Abd Hannan, "Post-Truth and Islamophobia Narration in the Contemporary Indonesian Political Constellation," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 10, no. 2 (December 21, 2020): 199–225, <https://doi.org/10.18326/ijims.v10i2.199-225>; Ali Maksum, "DISCOURSES ON ISLAM AND DEMOCRACY IN INDONESIA: A Study on the Intellectual Debate between Liberal Islam Network (JIL) and Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)," *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM* 11, no. 2 (December 5, 2017): 405, <https://doi.org/10.15642/JIIS.2017.11.2.405-422>.

Pada tingkat mikro, keberadaan pengajian (kelompok studi Islam) ekstrem dalam masyarakat berfungsi sebagai pemicu munculnya kelompok teroris. Hal ini terlihat dalam sebuah studi oleh Hwang and Schulze,²⁴ yang menemukan bahwa sekolah Islam ekstremis tertentu di Indonesia berkontribusi pada munculnya kelompok ekstremis melalui sesi pengajian Islam mereka. Sesi pengajian ini seringkali berfokus pada konsep "jihad" (secara umum, perjuangan) dan "khilafah", yang mengarah pada perilaku agama yang ekstrem. Namun, konsep jihad yang diajarkan di sekolah-sekolah ini sering kali merusak makna sejatinya dari perjuangan untuk tetap pada jalan Tuhan, menjadi penekanan pada perang melawan rezim yang menentang Islam. Menurut Bonner dan Esposito, kelompok ekstremis telah mengeksploitasi dan mengakar pada distorsi konsep jihad ini.²⁵ Ketiga fitur politik ekonomi Indonesia ini secara bersama-sama menjelaskan munculnya kelompok ekstremis dan teroris di Indonesia. Ketika ISIS muncul dan memanggil semua Muslim di seluruh dunia untuk bergabung dan membela ISIS sebagai khilafah yang sah, hal ini mendorong orang Indonesia yang tertarik untuk bergabung dan menjadi PTA.

Situasi politik Suriah telah berkontribusi pada munculnya ISIS.²⁶ Pada tingkat makro, pemerintahan Suriah ditandai oleh pemerintahan otoriter, dengan rezim al-Assad berkuasa sejak tahun 1971. Hafez al-Assad memimpin Suriah dari tahun 1971 hingga 2000, dan putranya, Bashar al-Assad, melanjutkan rezimnya hingga hari ini. *Arab Spring* pada tahun 2010 menyebabkan banyak negara Arab menuntut pemerintahan untuk mengundurkan diri. Ini termasuk demonstrasi di Suriah untuk menyingkirkan Bashar al-Assad dari kekuasaan. Rezim al-Assad, di sisi lain, bereaksi secara brutal terhadap demonstrasi ini dengan menyerang warga sipil dan menghancurkan bangunan umum seperti sekolah dan rumah sakit.²⁷ Pada tingkat sektoral, kebijakan ekonomi al-Assad hanya menguntungkan mereka yang berada dalam rezim dan mengabaikan masyarakat pedesaan, menyebabkan terbengkalainya sektor pertanian, yang biasanya menjadi sumber pendapatan masyarakat pedesaan.²⁸ Pada tingkat mikro, masyarakat terbagi menjadi dua sekte utama—Sunni dan Syiah—di mana Syiah merupakan minoritas di Suriah. Namun, ketika Hafez al-Assad memastikan kekuasaannya pada tahun 1970, ini dianggap sebagai kemenangan bagi Syiah, yang 'telah lama terpinggirkan dan dihina'.²⁹ Sejak rezim al-Assad didirikan pada tahun 1970, ia selalu menindas Sunni, yang merupakan sekte mayoritas di Suriah.³⁰ Dari perspektif Suriah terhadap AEP, tiga faktor ini dapat menjelaskan munculnya ISIS, yang kemudian mengundang Muslim di seluruh dunia untuk bergabung dan membela ISIS sebagai khilafah yang sah.

Analisis Pasar (AP)

Dalam kerangka Analisis Pasar (AP), analisis harga masukan yang dapat memicu fungsi Kejahatan Terorganisir Transnasional (*Transnational Organised Crime* - TOC) penting dan dapat mengganggu perkembangan TOC itu sendiri.³¹ ISIS dapat muncul dan 'beroperasi' melakukan serangan teror mulai Juli 2014 hingga kekalahan pada tahun 2017 oleh Pasukan

²⁴ Hwang and Schulze, "Why They Join."

²⁵ John L. Esposito, *Unholy War: Terror in the Name of Islam* (Oxford: Oxford Univ. Press, 2003); Michael David Bonner, *Jihad in Islamic History: Doctrines and Practice* (Princeton: Princeton University Press, 2006).

²⁶ Anne Speckhard and Molly Ellenberg, "The Effects of Assad's Atrocities and the Call to Foreign Fighters to Come to Syria on the Rise and Fall of the ISIS Caliphate," *Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression* 14, no. 2 (April 3, 2022): 169–85, <https://doi.org/10.1080/19434472.2020.1839118>.

²⁷ Speckhard and Ellenberg.

²⁸ Fawaz A. Gerges, *ISIS: A History* (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2017).

²⁹ Ariel I. Ahram, "Sexual Violence and the Making of ISIS," *Survival* 57, no. 3 (May 4, 2015): 64,.

³⁰ Gerges, *ISIS*.

³¹ The Global Initiative Against Transnational Organized Crime, "Development Responses to Organised Crime: An Analysis and Programme Framework."

Keamanan Irak³² karena mendapat dukungan pendanaan. Menurut Khan dan Ruiz Estrada, sumber pendanaan ISIS berasal dari penjualan minyak dan gas, yang dapat menghasilkan sekitar US\$3.000.000 pendapatan harian.³³ Selain itu, sumber pendanaan ISIS juga berasal dari sektor pertanian, dengan produk utama gandum dan barley (jelai). Pada tahun 2015, ISIS diprediksi memperoleh US\$56 juta dari kedua produk ini.³⁴ Karena ISIS memiliki sumber daya yang cukup untuk beroperasi sebagai kelompok teroris dan adanya propaganda untuk menggambarkan kualitas hidup yang baik di bawah pemerintahan ISIS, mereka dapat menerima dan memberdayakan PTA yang tertarik untuk bergabung.³⁵

Di sisi lain, sebelum tahun 2018, tidak ada larangan bagi warga Indonesia untuk pergi ke luar negeri dan bergabung dengan kelompok teroris. Namun, setelah diresmikannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018, jelas disebutkan bahwa warga Indonesia yang bergabung dengan kelompok teroris di luar negeri akan dikenai sanksi. Dengan memanfaatkan celah regulasi ini, sekitar 600 PTA Indonesia telah ada di Suriah sejak munculnya ISIS pada tahun 2014.³⁶ Menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 263/Pid.Sus/2020/PN Jkt Tim., salah satu PTA menyatakan bahwa dia telah menyiapkan Rp120.000.000 (£6.475) untuk masuk ke Suriah. Dana dialokasikan untuk pembelian beberapa tiket pesawat (Indonesia-Thailand-Iran), persiapan untuk menyeberang ke Suriah, dan dana darurat. Sumber dana dapat berasal dari dana pribadi atau sumbangan dari pendukung ISIS.

Analisis masuk pasar pada AP digunakan untuk menentukan seberapa mudah seseorang dapat masuk ke pasar serta penjaga pintu gerbang yang mengendalikan pasar.³⁷ Schulze dan Liow³⁸ lebih jauh mengeksplorasi seberapa mudah pendukung ISIS dan PTA Indonesia dapat direkrut dari kelompok studi Islam dan seminar. Dalam dua acara ini, ulama ekstrem menjelaskan kurikulum ISIS, yang membahas pelajaran seperti pentingnya khilafah dan syahid. Kemudian, para ulama akan mengambil sumpah dari murid atau pengikutnya untuk mendukung eksistensi ISIS. Hal ini terlihat dalam wawancara dengan seorang ulama ekstrem yang dilakukan oleh Schulze dan Liow (2019, hlm. 128). Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa keyakinan pada ISIS sebagai khilafah yang sah, yang diumumkan oleh ulama ekstrem melalui kelompok studi Islam dan seminar, berkontribusi pada aliran PTA Indonesia ke Suriah.

Analisis kekerasan dalam Analisis Pasar (AP) dapat menggambarkan tingkat keberhasilan dalam program intervensi. Namun, jika tidak ada bukti kekerasan dalam pasar, hal tersebut merupakan indikator bahwa negara melindungi aliran kejahatan yang diselenggarakan oleh TOC (GI-TOC, 2016). Dalam konteks ini, tidak ada bukti kekerasan dalam aliran PTA Indonesia yang terbang ke Suriah dan bergabung dengan ISIS. Namun, hal ini tidak berarti

³² Maarten P. Broekhof, Martijn W. M. Kitzen, and Frans P. B. Osinga, "A Tale of Two Mosuls, The Resurrection of the Iraqi Armed Forces and the Military Defeat of ISIS," *Journal of Strategic Studies* 45, no. 1 (January 2, 2022): 96–118, <https://doi.org/10.1080/01402390.2019.1694912>.

³³ Centre for Geopolitics & Security in Realism Studies, "Money Matters: Sources of ISIS' Funding and How to Disrupt Them" (Centre for Geopolitics & Security in Realism Studies, 2015), <http://cgsrs.org/publications/27>; A Swanson, "How the Islamic State Make Its Money," *The Washington Post*, November 18, 2015, <https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2015/11/18/how-isis-makes-its-money/>; Alam Khan and Mario Arturo Ruiz Estrada, "The Effects of Terrorism on Economic Performance: The Case of Islamic State in Iraq and Syria (ISIS)," *Quality & Quantity* 50, no. 4 (July 2016): 1645–61, <https://doi.org/10.1007/s11135-015-0226-9>.

³⁴ Hadi H. Jaafar and Eckart Woertz, "Agriculture as a Funding Source of ISIS: A GIS and Remote Sensing Analysis," *Food Policy* 64 (October 2016): 14–25, <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2016.09.002>.

³⁵ Anita Peresin and Alberto Cervone, "The Western *Muhajirat* of ISIS," *Studies in Conflict & Terrorism* 38, no. 7 (July 3, 2015): 495–509, <https://doi.org/10.1080/1057610X.2015.1025611>.

³⁶ R Barrett, "Beyond the Caliphate: Foreign Fighters and the Threat of Returnees" (The Soufan Center, 2017), <https://thesoufancenter.org/wp-content/uploads/2017/11/Beyond-the-Caliphate-Foreign-Fighters-and-the-Threat-of-Returnees-TSC-Report-October-2017-v3.pdf>.

³⁷ The Global Initiative Against Transnational Organized Crime, "Development Responses to Organised Crime: An Analysis and Programme Framework."

³⁸ Schulze and Liow, "Making Jihadis, Waging Jihad."

bahwa otoritas Indonesia turut serta dalam aliran tersebut. Sebelum otoritas Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan hukum terorisme sebelumnya, pemerintah Indonesia tidak memiliki undang-undang tertentu yang melarang warganya berpartisipasi dalam konflik di negara lain, termasuk Suriah.³⁹ Selanjutnya, pergerakan PTA Indonesia tidak terdeteksi oleh otoritas Indonesia karena mereka menggunakan negara-negara proxy seperti Malaysia atau Thailand sebelum berangkat ke Turki. Setelah tiba di Turki, mereka mengambil rute ke provinsi Hatay yang memiliki perbatasan langsung dengan Suriah.⁴⁰ Berdasarkan fakta sebelumnya, dapat dikemukakan bahwa otoritas Indonesia tidak dapat menentukan tujuan sebenarnya warganya pergi ke Malaysia atau Thailand, karena keduanya adalah tujuan wisata rutin.⁴¹

Dari elemen perlindungan dalam AP, diketahui bahwa rezim al-Assad secara aktif melindungi dan mensponsori kelompok teroris jauh sebelum munculnya ISIS pada tahun 2014. Perlindungan tersebut mencakup senjata, tempat persembunyian, dan dukungan keuangan.⁴² Pola yang sama terjadi ketika ISIS muncul, dimana rezim al-Assad tidak secara serius menargetkan ISIS. Alasan pertama adalah karena rezim al-Assad memiliki hubungan bisnis dengan ISIS dengan melakukan perdagangan minyak dan gandum dari wilayah yang dikuasai oleh ISIS.⁴³ Selanjutnya, indikasi rezim al-Assad untuk mempertahankan eksistensi ISIS juga terlihat dalam laporan Financial Action Task Force⁴⁴ dimana masih ada 20 lembaga keuangan Suriah yang beroperasi di wilayah yang sepenuhnya dikendalikan oleh ISIS. Dapat dikatakan bahwa hubungan dengan layanan keuangan memastikan kemampuan organisasi teroris seperti ISIS untuk beroperasi dan melakukan teror, karena uang dianggap sebagai "darah" bagi organisasi.⁴⁵ Konsekuensi dari perlindungan rezim al-Assad adalah bahwa pejuang asing dari berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, dapat mengakses wilayah ISIS.

Elemen terakhir dari AP adalah legitimasi, di mana TOC dapat memperoleh legitimasi dari sebagian populasi tertentu. Aliran PTA Indonesia yang terbang ke Suriah dimulai ketika Abu Bakr al-Baghdadi menyatakan dirinya dalam khotbah sebagai khalifah bagi Muslim di seluruh dunia. Ia juga menekankan pentingnya membela khilafah dan memanggil semua Muslim menjadi satu Ummah (komunitas).⁴⁶ Setelah munculnya ISIS, ulama Indonesia mengorganisir kelompok studi Islam yang menekankan pentingnya Muslim membela dan bergabung dengan ISIS sebagai khilafah di Suriah. Jika mahasiswa dalam kelompok studi ini tertarik bergabung dengan ISIS dan terbang ke Suriah, penilaian akan dilakukan oleh para ulama untuk melihat sejauh mana seriusnya mahasiswa tersebut untuk bergabung dengan ISIS dan menjadi PTA.⁴⁷

³⁹ S Jones and Solahudin, "ISIS in Indonesia," *Southeast Asian Affairs*, 2015, 154–63, <https://www.jstor.org/stable/44112803>.

⁴⁰ Institute for Policy Analysis of Conflict, "Support for 'Islamic State' in Indonesian Prisons" (Institute for Policy Analysis of Conflict, 2015), <https://www.jstor.org/stable/resrep07818.1>; M Taufiqurrohmah, "The Road to ISIS: How Indonesian Jihadists Travel to Iraq and Syria," *Counter Terrorist Trends and Analyses* 7, no. 4 (2015): 17–25, <https://www.jstor.org/stable/26351346>.

⁴¹ John C. Henderson, "Regionlisation and Tourism: The Indonesia-Malaysia-Singapore Growth Triangle," *Current Issues in Tourism* 4, no. 2–4 (August 2001): 78–93, <https://doi.org/10.1080/13683500108667883>.

⁴² Michael Freeman, "The Sources of Terrorist Financing: Theory and Typology," *Studies in Conflict & Terrorism* 34, no. 6 (June 2011): 465.

⁴³ M Levitt, "The Role of the Islamic State in the Assad Regime's Strategy for Regime Survival: How and Why the Assad Regime Supported the Islamic State" (The Washington Institute for Near East Policy, 2021), <https://www.washingtoninstitute.org/media/4698?disposition=inline>.

⁴⁴ Financial Action Task Force, "Financing of the Terrorist Organisation Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL)" (France: Financial Action Task Force, 2015), <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Methodsand Trends/Financing-of-terrorist-organisation-isil.html>.

⁴⁵ Freeman, "The Sources of Terrorist Financing."

⁴⁶ Remy Low, "Making up the Ummah : The Rhetoric of ISIS as Public Pedagogy," *Review of Education, Pedagogy, and Cultural Studies* 38, no. 4 (August 7, 2016): 297–316, <https://doi.org/10.1080/10714413.2016.1203679>.

⁴⁷ Hwang and Schulze, "Why They Join"; Schulze and Liow, "Making Jihadis, Waging Jihad."

Analisis Dampak

Aliran pejuang asing Indonesia tidak hanya merugikan Suriah, tetapi juga merugikan masyarakat Indonesia. Dari perspektif Indonesia, terdapat dua kerugian sosial, yaitu penyebaran ideologi ekstrem yang semakin parah dan Islamofobia. Sementara itu, dari perspektif Suriah, penurunan kinerja ekonomi selama keberadaan ISIS akan dianggap sebagai kerugian ekonomi.

Jumlah PTA Indonesia yang terbang ke Suriah dari tahun 2014 hingga 2018 diperkirakan mencapai 1.605 orang, sedangkan jumlah mereka yang kembali ke Indonesia pada periode yang sama adalah 344 orang.⁴⁸ Permasalahan utamanya adalah mereka yang kembali pulang ke Indonesia yang dapat menyebabkan kerugian sosial karena mereka kini dapat memperparah penyebaran ideologi ekstrem, memiliki pengalaman pertempuran, dan dilengkapi dengan keterampilan untuk membuat atau menggunakan senjata. Semua aspek ini berasal dari pengalaman mereka saat berperang dengan ISIS di Suriah.⁴⁹ Dengan alasan tersebut, mereka yang kembali dapat membentuk kelompok teroris baru, mempengaruhi orang lain untuk bergabung dengan kelompok studi Islam ekstrem, dan melakukan tindakan teror di masa depan.⁵⁰ Selain itu, mereka yang pulang dapat menghadapi stigmatisasi negatif dari masyarakat yang dapat menghambat proses reintegrasi ke dalam masyarakat. Dampak dari stigma negatif ini adalah mereka yang pulang dari ISIS merasa terisolasi, yang dapat mendorong mereka untuk melakukan tindakan teror lainnya.⁵¹

Munculnya ISIS, pendirian beberapa kelompok teroris Indonesia, dan jumlah PTA Indonesia yang terbang ke Suriah menciptakan Islamophobia di dalam masyarakat, meskipun Indonesia dikenal sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar.⁵² Islam kemudian dianggap sebagai agama ekstrem yang mengajarkan kebencian terhadap orang di luar Islam dan menyebarkan gagasan kekerasan karena para teroris menggunakan atribut Islam saat melakukan aksi teror. Selain itu, gejala Islamophobia ditunjukkan secara intensif di media sosial,⁵³ kurikulum pendidikan dasar,⁵⁴ dan bahkan gerakan politik.⁵⁵ Berdasarkan fakta ini, dapat dikatakan bahwa aliran PTA Indonesia ke Suriah yang dikombinasikan dengan aksi teror intensif oleh kelompok teroris menciptakan Islamofobia yang dianggap merugikan sosial.

Di sisi lain, Suriah juga menderita akibat adanya pejuang asing dari seluruh dunia, termasuk Indonesia. Perekonomian Suriah dapat dikatakan menderita akibat peningkatan teror dari ISIS dan munculnya pejuang asing yang membawa lebih banyak kekerasan ke Suriah. Menurut Khan dan Ruiz Estrada (2016) dan Devadas, Elbadawi, dan Loayza (2021), kinerja

⁴⁸ Rahmanto, Meliala, and Lolo, "Ideology Deconstruction of Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) Returnees in Indonesia."

⁴⁹ Jones and Solahudin, "ISIS in Indonesia."

⁵⁰ M. Zaki Mubarak, "DARI NII KE ISIS: Transformasi Ideologi Dan Gerakan Dalam Islam Radikal Di Indonesia Kontemporer," *Epistémé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 10, no. 1 (June 13, 2015): 77–98, <https://doi.org/10.21274/epis.2015.10.1.77-98>; Fauzia Gustarina Cempaka Timur and Yanyan M. Yani, "FACING ISIS RETURNING FOREIGN TERRORIST FIGHTERS: INDONESIA PERSPECTIVE," *Jurnal Pertahanan* 5, no. 2 (August 2, 2019): 38, <https://doi.org/10.33172/jp.v5i2.553>.

⁵¹ Ilyas Mohammed, "Critical Reflections on De-Radicalisation in Indonesia," *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 10, no. 1 (December 26, 2020): 43–57, <https://doi.org/10.26618/ojip.v10i1.3097>.

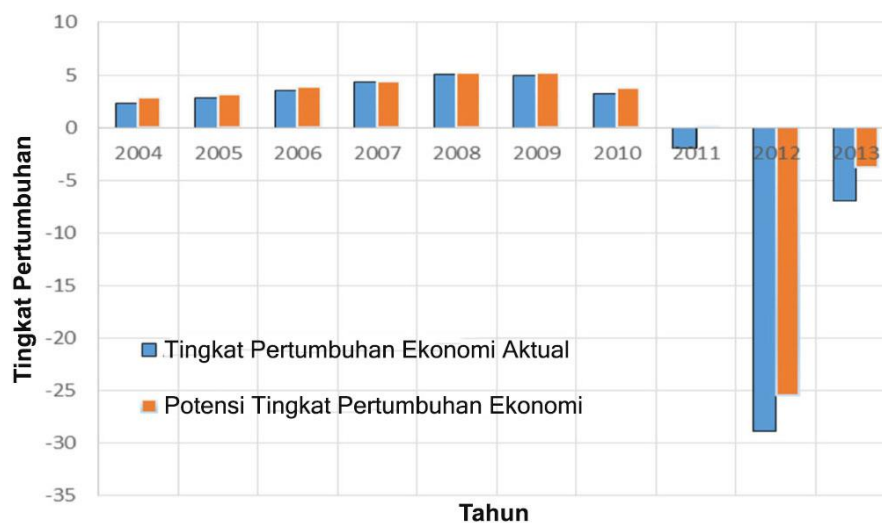
⁵² Shukri, "The Perception of Indonesian Youths toward Islamophobia."

⁵³ Kastolani Kastolani, "Understanding the Delivery of Islamophobic Hate Speech via Social Media in Indonesia," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 10, no. 2 (December 21, 2020): 247–70, <https://doi.org/10.18326/ijims.v10i2.247-270>.

⁵⁴ Saifuddin Dhuhr et al., "Passive Islamophobia and Cultural National Construction: A Critical Note on Art Curriculum," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 11, no. 1 (June 21, 2021): 1–27, <https://doi.org/10.18326/ijims.v11i1.1-27>.

⁵⁵ Syarif, A. Mughni, and Hannan, "Post-Truth and Islamophobia Narration in the Contemporary Indonesian Political Constellation."

ekonomi telah menurun sejak munculnya ISIS.⁵⁶ Gambar 2 di bawah menunjukkan kinerja ekonomi sebelum dan sesudah terbentuknya ISIS.



Gambar 2. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sebelum dan Setelah Terbentuknya ISIS⁵⁷

Periode peperangan yang panjang tidak hanya menyebabkan penurunan perekonomian tetapi juga kehilangan sumber daya manusia dan infrastruktur, terutama yang berkaitan dengan energi, yang merupakan masukan utama bagi pembangunan ekonomi.⁵⁸ Akses ke energi sangat penting karena dianggap sebagai input untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang layak.⁵⁹

Setelah menilai dampak kerugian yang disebabkan oleh aliran PTA Indonesia ke Suriah sebagaimana diuraikan di atas, penting untuk mengambil langkah-langkah intervensi kritis untuk mengurangi kerugian yang disebabkan oleh aliran tersebut. Pencegahan penyebaran ideologi ekstrem adalah langkah paling penting yang harus diambil oleh pemerintah Indonesia, karena hal ini akan menghentikan aliran PTA Indonesia di masa depan dan meningkatkan situasi sosial dan ekonomi di Suriah. Sementara itu, pemerintah Suriah dapat melakukan intervensi terhadap kerugian ekonomi dengan membangun kembali sektor ekonomi di Suriah.

Teori Perubahan dan Solusi yang Tepat

Menghentikan penyebaran ideologi ekstrem memerlukan pendekatan bertahap. Dimulai dengan memberikan hukuman bagi mereka yang menyebarkan ideologi ekstrem dan dilanjutkan dengan komunikasi intensif dan negosiasi untuk menderadikalisasi mereka yang telah terpapar ideologi ekstrem dan menyebarkannya ke masyarakat melalui media seperti media sosial, situs web, atau sesi kajian Islam. Teori perubahan adalah upaya untuk mengidentifikasi dan menjelaskan keyakinan, asumsi, dan hipotesis secara eksplisit tentang

⁵⁶ Khan and Ruiz Estrada, "The Effects of Terrorism on Economic Performance"; Sharmila Devadas, Ibrahim Elbadawi, and Norman V. Loayza, "Growth in Syria: Losses from the War and Potential Recovery in the Aftermath," *Middle East Development Journal* 13, no. 2 (July 3, 2021): 215–44, <https://doi.org/10.1080/17938120.2021.1930829>.

⁵⁷ Khan and Ruiz Estrada, "The Effects of Terrorism on Economic Performance."

⁵⁸ Fuad Alhaj Omar, Ibrahim Mahmoud, and Karla G. Cedano, "Energy Poverty in the Face of Armed Conflict: The Challenge of Appropriate Assessment in Wartime Syria," *Energy Research & Social Science* 95 (January 2023): 102910, <https://doi.org/10.1016/j.erss.2022.102910>.

⁵⁹ Michaël Aklin et al., *Escaping the Energy Poverty Trap: When and How Governments Power the Lives of the Poor* (Cambridge, Mass: MIT press, 2018).

bagaimana perubahan terjadi'.⁶⁰ Usulan pertama untuk menghentikan penyebaran ideologi ekstrem adalah dengan mengadopsi teori perubahan "**Deterrence**". Dalam konteks teori perubahan, *deterrence* berarti mengejar dan menghukum orang yang terlibat dalam TOC dengan tujuan utama untuk melepaskan orang yang berusaha terlibat dalam TOC.⁶¹ Sebelum diresmikannya Undang-Undang No. 5 tahun 2018 di Indonesia, tidak ada hukuman untuk penyebaran ideologi ekstrem. Namun, menurut Undang-Undang No. 5 tahun 2018, siapa pun yang menyebarkan ideologi ekstrem akan dihukum. Dengan demikian, Undang-Undang No. 5 tahun 2018 mampu menutup celah dalam mengatasi penyebaran ideologi ekstrem.

Usulan kedua untuk membatasi ideologi ekstrem adalah dengan "**mengelola adaptasi kejahatan untuk meminimalkan dampak negatif pada kekerasan, keamanan, dan konflik**" dari teori perubahan. Salah satu pendekatan yang harus diadopsi adalah negosiasi dengan kelompok TOC, dimana dalam konteks ini, yang dimaksud kelompok TOC adalah kelompok sesi kajian Islam ekstrem yang telah diidentifikasi sebagai pendukung ISIS. Rucktäschel dan Schuck⁶² berpendapat bahwa penggunaan negosiasi atau komunikasi sebagai pendekatan lunak sangat penting dalam upaya mengurangi kerugian akibat terorisme di Indonesia. Komunikasi dan negosiasi dengan pendukung ISIS yang telah terpapar ideologi ekstrem dapat efektif jika mantan teroris terlibat dalam pertemuan ini. Mantan teroris yang telah terpapar ideologi ekstrem dapat memainkan peran penting dalam membantu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Indonesia menjalankan program deradikalisasi. Dengan argumennya, diharapkan mantan teroris dapat menyadari seseorang yang memiliki ideologi ekstrem dan memahami metodologi untuk menderadikalisasinya. Selanjutnya, penting untuk melakukan program deradikalisasi bagi mereka yang kembali dari Suriah karena program deradikalisasi yang ada saat ini dianggap tidak efektif karena adanya prosedural⁶³ dan kurangnya kompetensi dari pejabat yang ditugaskan untuk menderadikalisasi mantan teroris.⁶⁴ Oleh karena itu, peran mantan teroris sangat kritis dalam mengelola adaptasi ideologi ekstrem.

Usulan ketiga adalah mengadaptasi "**perubahan budaya**" di tempat TOC dapat berkembang karena mendapatkan dukungan dari masyarakat. Dalam konteks ini, penyebaran ideologi ekstrem terjadi karena ideologi ini dibiakkan oleh keberadaan kelompok kajian Islam ekstrem⁶⁵ dan pesantren yang juga dipimpin oleh ulama ekstremis.⁶⁶ Kelompok kajian Islam dan pesantren bergantung pada pengetahuan ulama yang mengajar di dua organisasi ini. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Indonesia untuk mengembangkan kurikulum Islam kontemporer untuk sekolah yang menekankan pelajaran anti-radikalisasi. Selanjutnya, pemerintah Indonesia perlu untuk mendefinisikan ulang konsep jihad dari memiliki citra negatif (misalnya, membunuh orang di luar peperangan) menjadi citra positif (seperti berjuang untuk mempertahankan kendali diri saat berada dalam situasi sulit) dan menyertakannya dalam kurikulum Islam kontemporer. Dapat dikatakan bahwa definisi jihad telah disalahartikan

⁶⁰ Midgley, Briscoe, and Bertoli, "Identifying Approaches and Measuring Impacts of Programmes Focused on Transnational Organised Crime.", 6.

⁶¹ Midgley, Briscoe, and Bertoli.

⁶² Kathrin Rucktäschel and Christoph Schuck, "An Analysis of Counterterrorism Measures Taken by Indonesia since the 2002 Bali Bombings," *The Pacific Review* 33, no. 6 (November 1, 2020): 1022–51, <https://doi.org/10.1080/09512748.2019.1627485>.

⁶³ J Indrawan and M. P. Aji, "Efektivitas Program Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Terhadap Narapidana Terorisme Di Indonesia," *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 9, no. 2 (2019): 1–20, <https://pdfs.semanticscholar.org/015e/35caa996bd12b5f85d67d3dc34adb713d963.pdf>.

⁶⁴ A.A. Wibisono and I Maulana, "Indonesia's Response to Returning Foreign Fighters: Network Affiliation as Basis for Risk Assessment," *Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism* 18, no. 1 (2023): 122–34, <https://doi.org/10.1080/18335330.2022.2037690>.

⁶⁵ Schulze and Liow, "Making Jihadis, Waging Jihad"; Hwang and Schulze, "Why They Join."

⁶⁶ E Susanto, "Kemungkinan Munculnya Paham Islam Radikal di Pondok Pesantren," *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2007), <https://doi.org/10.19105/tjpi.v2i1.205>.

dengan sempit dengan sengaja oleh ulama ekstremis.⁶⁷ Selanjutnya, konsep "perubahan budaya" adalah untuk meyakinkan orang yang mendukung ideologi ekstremis untuk berhenti melakukannya karena berdampak negatif pada persepsi tentang Islam.⁶⁸

Usulan keempat adalah "transformasi ekonomi" untuk mendistribusikan kesejahteraan di Suriah sehingga tidak ada konflik antar sektor. Suriah harus memprioritaskan pertumbuhan ekonomi. Menurut Devadas, Elbadawi, dan Loayza,⁶⁹ jika konflik diselesaikan, Suriah akan tumbuh pada tingkat 6% per tahun. Penyelesaian konflik Suriah mungkin menarik investasi langsung dari pihak asing, yang akan meningkatkan kinerja ekonomi.⁷⁰ Selanjutnya, pemerintah Suriah dapat fokus pada pengembangan sektor utama Suriah, yaitu pertanian, yang akan menyerap pekerja, menghasilkan lebih banyak pendapatan, dan mengurangi kemiskinan.⁷¹ Namun, penting diingat bahwa transformasi ekonomi harus diikuti dengan distribusi kesejahteraan dan pengurangan kronisme yang telah menyebar di bawah rezim al-Assad. Dapat dikatakan bahwa distribusi kesejahteraan yang tidak merata, kronisme, dan penindasan terhadap sekte tertentu berkontribusi pada pembentukan ISIS.⁷²

Kesimpulan

Penelitian ini membahas tentang fenomena warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi pejuang teroris asing (PTA) ke Suriah dengan menjelaskannya dari analisis ekonomi politik (AEP), analisis pasar (AP), analisis dampak, dan teori perubahan. Analisis ekonomi politik menunjukkan bahwa penindasan di bawah rezim Orde Baru, gerakan islamofobia pada pemerintah Indonesia, dan keberadaan pengajian ekstrem berperan dalam kemunculan kelompok teroris dan PTA di Indonesia.⁷³ Selanjutnya, hasil analisis pasar (AP) diketahui ISIS merekrut PTA melalui kelompok studi Islam dan seminar yang dipimpin oleh ulama ekstremis, memiliki sumber daya yang cukup untuk beroperasi sebagai kelompok teroris, dan dilindungi serta disponsori oleh rezim al-Assad.⁷⁴ Oleh karena itu, banyak WNI yang merasa aman untuk menjadi PTA dan pergi ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS. Terdapat beberapa usulan upaya yang dapat ditempuh oleh pemerintah Indonesia untuk menghentikan hal ini, yaitu menciptakan efek jera dengan menghukum orang yang terlibat dalam kelompok teroris manapun, mengelola adaptasi kejahatan untuk meminimalkan dampak negatif dengan negosiasi atau komunikasi sebagai metode pendekatan, dan mengembangkan kurikulum pendidikan terkait Islam kontemporer yang menekankan pelajaran anti-radikalisasi. Meskipun banyak PTA yang sudah kembali ke Indonesia sejak ISIS dikalahkan, penelitian ini berpendapat bahwa menggunakan AEP, AP, dan Teori Perubahan bermanfaat untuk menganalisis pergerakan PTA Indonesia di masa depan dan mengambil tindakan pencegahan untuk menghentikannya.

⁶⁷ Esposito, *Unholy War*; Bonner, *Jihad in Islamic History*; Meir Hatina, "Contesting Violence in Radical Islam: Sayyid Imām al-Sharīf's Ethical Perception," *Islamic Law and Society* 23, no. 1–2 (March 14, 2016): 120–40, <https://doi.org/10.1163/15685195-02312p05>.

⁶⁸ Hatina, "Contesting Violence in Radical Islam."

⁶⁹ Devadas, Elbadawi, and Loayza, "Growth in Syria."

⁷⁰ Mahmoud Alajaty, "Institutional Reform and FDI Decision in Transition Economies: A Qualitative Study of Syria," *The International Journal of Entrepreneurship and Innovation* 18, no. 3 (August 2017): 164–74, <https://doi.org/10.1177/1465750317711982>.

⁷¹ Benedetto Rocchi, Donato Romano, and Raid Hamza, "Agriculture Reform and Food Crisis in Syria: Impacts on Poverty and Inequality," *Food Policy* 43 (December 2013): 190–203, <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2013.09.009>.

⁷² Gerges, *ISIS*; Speckhard and Ellenberg, "The Effects of Assad's Atrocities and the Call to Foreign Fighters to Come to Syria on the Rise and Fall of the ISIS Caliphate."

⁷³ Hadiz, "Towards a Sociological Understanding of Islamic Radicalism in Indonesia"; Hadiz and Teik, "Approaching Islam and Politics from Political Economy."

⁷⁴ Freeman, "The Sources of Terrorist Financing," 465.

Daftar Pustaka

- Ahram, Ariel I. 2015. "Sexual Violence and the Making of ISIS." *Survival* 57 (3): 57–78. <https://doi.org/10.1080/00396338.2015.1047251>.
- Aklin, Michaël, Patrick Bayer, S.P. Harish, and Johannes Urpelainen. 2018. *Escaping the Energy Poverty Trap: When and How Governments Power the Lives of the Poor*. Cambridge, Mass: MIT press.
- Alajaty, Mahmoud. 2017. "Institutional Reform and FDI Decision in Transition Economies: A Qualitative Study of Syria." *The International Journal of Entrepreneurship and Innovation* 18 (3): 164–74. <https://doi.org/10.1177/1465750317711982>.
- Alhaj Omar, Fuad, Ibrahim Mahmoud, and Karla G. Cedano. 2023. "Energy Poverty in the Face of Armed Conflict: The Challenge of Appropriate Assessment in Wartime Syria." *Energy Research & Social Science* 95 (January): 102910. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2022.102910>.
- Barrett, R. 2017. "Beyond the Caliphate: Foreign Fighters and the Threat of Returnees." The Soufan Center. <https://thesoufancenter.org/wp-content/uploads/2017/11/Beyond-the-Caliphate-Foreign-Fighters-and-the-Threat-of-Returnees-TSC-Report-October-2017-v3.pdf>.
- Bonner, Michael David. 2006. *Jihad in Islamic History: Doctrines and Practice*. Princeton: Princeton University Press.
- Broekhof, Maarten P., Martijn W. M. Kitzen, and Frans P. B. Osinga. 2022. "A Tale of Two Mosuls, The Resurrection of the Iraqi Armed Forces and the Military Defeat of ISIS." *Journal of Strategic Studies* 45 (1): 96–118. <https://doi.org/10.1080/01402390.2019.1694912>.
- Brown, C. 2007. "The New Terrorism Debate." *Alternatives: Turkish Journal of International Relations* 6 (3 & 4): 28–43.
- Centre for Geopolitics & Security in Realism Studies. 2015. "Money Matters: Sources of ISIS' Funding and How to Disrupt Them." Centre for Geopolitics & Security in Realism Studies. <http://cgsrs.org/publications/27>.
- Delia Deckard, Natalie, and David Jacobson. 2015. "The Prosperous Hardliner: Affluence, Fundamentalism, and Radicalization in Western European Muslim Communities." *Social Compass* 62 (3): 412–33. <https://doi.org/10.1177/0037768615587827>.
- Devadas, Sharmila, Ibrahim Elbadawi, and Norman V. Loayza. 2021. "Growth in Syria: Losses from the War and Potential Recovery in the Aftermath." *Middle East Development Journal* 13 (2): 215–44. <https://doi.org/10.1080/17938120.2021.1930829>.
- Dhuhri, Saifuddin, Hamka Hasan, Ahmad Sholeh Sakni, and Iffatul Umniati Ismail. 2021. "Passive Islamophobia and Cultural National Construction: A Critical Note on Art Curriculum." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 11 (1): 1–27. <https://doi.org/10.18326/ijims.v11i1.1-27>.
- Eradication of Terrorist Act, 2018, c. 12 A (Indonesia)
- Esposito, John L. 2003. *Unholy War: Terror in the Name of Islam*. Oxford: Oxford Univ. Press.
- Financial Action Task Force. 2015. "Financing of the Terrorist Organisation Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL)." France: Financial Action Task Force. <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Methodsand Trends/Financing-of-terrorist-organisation-isil.html>.
- Freeman, Michael. 2011. "The Sources of Terrorist Financing: Theory and Typology." *Studies in Conflict & Terrorism* 34 (6): 461–75. <https://doi.org/10.1080/1057610X.2011.571193>.
- Gerges, Fawaz A. 2017. *ISIS: A History*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Global Terrorism Database. n.d. "Global Terrorism Database." Global Terrorism Database. <https://www.start.umd.edu/gtd/search/Results.aspx?search=iNDONESIA&sa.x=0&sa.y=0>.

- Gofas, A. 2012. "'Old' vs. 'New' Terrorism: What's in a Name?" *International Relations Council of Turkey* 8 (32): 17–32. <https://www.jstor.org/stable/43926201?sid=primo>.
- Hadiz, Vedi R. 2008. "Towards a Sociological Understanding of Islamic Radicalism in Indonesia." *Journal of Contemporary Asia* 38 (4): 638–47. <https://doi.org/10.1080/00472330802311795>.
- Hadiz, Vedi R., and Richard Robison. 2012. "Political Economy and Islamic Politics: Insights from the Indonesian Case." *New Political Economy* 17 (2): 137–55. <https://doi.org/10.1080/13563467.2010.540322>.
- Hadiz, Vedi R., and Khoo Boo Teik. 2011. "Approaching Islam and Politics from Political Economy: A Comparative Study of Indonesia and Malaysia." *The Pacific Review* 24 (4): 463–85. <https://doi.org/10.1080/09512748.2011.596561>.
- Hegghammer, T. 2010. "The Rise of Muslim Foreign Fighters: Islam and the Globalization of Jihad." *International Security* 35 (3): 53–94. <https://muse.jhu.edu/article/407198>.
- Hekmatpour, Peyman, and Thomas J. Burns. 2019. "Perception of Western Governments' Hostility to Islam among European Muslims before and after ISIS: The Important Roles of Residential Segregation and Education." *The British Journal of Sociology* 70 (5): 2133–65. <https://doi.org/10.1111/1468-4446.12673>.
- Henderson, John C. 2001. "Regionlisation and Tourism: The Indonesia-Malaysia-Singapore Growth Triangle." *Current Issues in Tourism* 4 (2–4): 78–93. <https://doi.org/10.1080/13683500108667883>.
- Hwang, Julie Chernov, and Kirsten E. Schulze. 2018. "Why They Join: Pathways into Indonesian Jihadist Organizations." *Terrorism and Political Violence* 30 (6): 911–32. <https://doi.org/10.1080/09546553.2018.1481309>.
- Indrawan, J, and M. P. Aji. 2019. "Efektivitas Program Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Terhadap Narapidana Terorisme Di Indonesia." *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 9 (2): 1–20. <https://pdfs.semanticscholar.org/015e/35caa996bd12b5f85d67d3dc34adb713d963.pdf>.
- Institute for Policy Analysis of Conflict. 2015. "Support for 'Islamic State' in Indonesian Prisons." *Institute for Policy Analysis of Conflict*. <https://www.jstor.org/stable/resrep07818.1>.
- Jaafar, Hadi H., and Eckart Woertz. 2016. "Agriculture as a Funding Source of ISIS: A GIS and Remote Sensing Analysis." *Food Policy* 64 (October): 14–25. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2016.09.002>.
- Jones, S. 2010. "New Order Repression and the Birth of Jemaah Islamiyah." In *Soeharto's New Order and Its Legacy: Essays in Honour of Harold Crouch*, by Edward Aspinall and G Fealy, 39–48. ANU Press.
- Jones, S, and Solahudin. 2015. "ISIS in Indonesia." *Southeast Asian Affairs*, 154–63. <https://www.jstor.org/stable/44112803>.
- Kastolani, Kastolani. 2020. "Understanding the Delivery of Islamophobic Hate Speech via Social Media in Indonesia." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 10 (2): 247–70. <https://doi.org/10.18326/ijims.v10i2.247-270>.
- Khan, Alam, and Mario Arturo Ruiz Estrada. 2016. "The Effects of Terrorism on Economic Performance: The Case of Islamic State in Iraq and Syria (ISIS)." *Quality & Quantity* 50 (4): 1645–61. <https://doi.org/10.1007/s11135-015-0226-9>.
- Lampe, Klaus von. 2016. *Organized Crime: Analyzing Illegal Activities, Criminal Structures and Extra-Legal Governance*. Los Angeles: SAGE.
- Levitt, M. 2021. "The Role of the Islamic State in the Assad Regime's Strategy for Regime Survival: How and Why the Assad Regime Supported the Islamic State." *The Washington Institute for Near East Policy*. <https://www.washingtoninstitute.org/media/4698?disposition=inline>.

- Low, Remy. 2016. "Making up the Ummah : The Rhetoric of ISIS as Public Pedagogy." *Review of Education, Pedagogy, and Cultural Studies* 38 (4): 297–316. <https://doi.org/10.1080/10714413.2016.1203679>.
- Maksum, Ali. 2017. "DISCOURSES ON ISLAM AND DEMOCRACY IN INDONESIA: A Study on the Intellectual Debate between Liberal Islam Network (JIL) and Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)." *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM* 11 (2): 405. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2017.11.2.405-422>.
- Masters, Daniel. 2008. "The Origin of Terrorist Threats: Religious, Separatist, or Something Else?" *Terrorism and Political Violence* 20 (3): 396–414. <https://doi.org/10.1080/09546550802073359>.
- Midgley, Tim, Ivan Briscoe, and Daniel Bertoli. 2014. "Identifying Approaches and Measuring Impacts of Programmes Focused on Transnational Organised Crime." United Kingdom: Department for International Development. <https://www.saferworld.org.uk/resources/publications/812-identifying-approaches-and-measuring-impacts-of-programmes-focused-on-transnational-organised-crime>.
- Mohammed, Ilyas. 2020. "Critical Reflections on De-Radicalisation in Indonesia." *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 10 (1): 43–57. <https://doi.org/10.26618/ojip.v10i1.3097>.
- Mubarak, M. Zaki. 2015. "DARI NII KE ISIS: Transformasi Ideologi Dan Gerakan Dalam Islam Radikal Di Indonesia Kontemporer." *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 10 (1): 77–98. <https://doi.org/10.21274/epis.2015.10.1.77-98>.
- Peresin, Anita, and Alberto Cervone. 2015. "The Western Muhajirat of ISIS." *Studies in Conflict & Terrorism* 38 (7): 495–509. <https://doi.org/10.1080/1057610X.2015.1025611>.
- Pratt, Douglas. 2010. "Religion and Terrorism: Christian Fundamentalism and Extremism." *Terrorism and Political Violence* 22 (3): 438–56. <https://doi.org/10.1080/09546551003689399>.
- Pusparisa, Y. 2021. "Korban Luka Akibat Teror Bom Di Indonesia (2002-2021)."
- Rahmanto, Didik Novi, Adrianus Eliasta Meliala, and Ferdinand Andi Lolo. 2020. "Ideology Deconstruction of Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) Returnees in Indonesia." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 10 (2): 381–408. <https://doi.org/10.18326/ijims.v10i2.381-408>.
- Rocchi, Benedetto, Donato Romano, and Raid Hamza. 2013. "Agriculture Reform and Food Crisis in Syria: Impacts on Poverty and Inequality." *Food Policy* 43 (December): 190–203. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2013.09.009>.
- Roosa, John. 2006. *Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto's Coup d'état in Indonesia*. New Perspectives in Southeast Asian Studies. Madison, Wis: University of Wisconsin Press.
- Rucktäschel, Kathrin, and Christoph Schuck. 2020. "An Analysis of Counterterrorism Measures Taken by Indonesia since the 2002 Bali Bombings." *The Pacific Review* 33 (6): 1022–51. <https://doi.org/10.1080/09512748.2019.1627485>.
- Schils, Nele, and Antoinette Verhage. 2017. "Understanding How and Why Young People Enter Radical or Violent Extremist Groups." *Application/pdf. International Journal of Conflict and Violence (IJCIV)*, June, 1-17 Pages, 345 kB. <https://doi.org/10.4119/UNIBI/IJCIV.473>.
- Schulze, Kirsten E., and Joseph Chinyong Liow. 2019. "Making Jihadis, Waging Jihad: Transnational and Local Dimensions of the ISIS Phenomenon in Indonesia and Malaysia." *Asian Security* 15 (2): 122–39. <https://doi.org/10.1080/14799855.2018.1424710>.
- Shukri, Syaza Farhana Mohamad. 2019. "The Perception of Indonesian Youths toward Islamophobia: An Exploratory Study." *Islamophobia Studies Journal* 5 (1). <https://doi.org/10.13169/islastudj.5.1.0061>.

- Speckhard, Anne, and Molly Ellenberg. 2022. "The Effects of Assad's Atrocities and the Call to Foreign Fighters to Come to Syria on the Rise and Fall of the ISIS Caliphate." *Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression* 14 (2): 169–85. <https://doi.org/10.1080/19434472.2020.1839118>.
- Stampnitzky, L. 2017. "Can Terrorism Be Defined?" In *Constructions of Terrorism: An Interdisciplinary Approach to Research and Policy*, by M Stohl, R Burchill, and S Englund, 11–20. University of California Press.
- Susanto, E. 2007. "Kemungkinan Munculnya Paham Islam Radikal di Pondok Pesantren." *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam* 2 (1). <https://doi.org/10.19105/tjpi.v2i1.205>.
- Swanson, A. 2015. "How the Islamic State Make Its Money." *The Washington Post*, November 18, 2015. <https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2015/11/18/how-isis-makes-its-money/>.
- Syarif, Zainuddin, Syafiq A. Mughni, and Abd Hannan. 2020. "Post-Truth and Islamophobia Narration in the Contemporary Indonesian Political Constellation." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 10 (2): 199–225. <https://doi.org/10.18326/ijims.v10i2.199-225>.
- Taufiqurrohman, M. 2015. "The Road to ISIS: How Indonesian Jihadists Travel to Iraq and Syria." *Counter Terrorist Trends and Analyses* 7 (4): 17–25. <https://www.jstor.org/stable/26351346>.
- Taylor, M., and J. Horgan. 2001. "The Psychological and Behavioural Bases of Islamic Fundamentalism." *Terrorism and Political Violence* 13 (4): 37–71. <https://doi.org/10.1080/09546550109609699>.
- The Global Initiative Against Transnational Organized Crime. 2016. "Development Responses to Organised Crime: An Analysis and Programme Framework." Geneva: The Global Initiative Against Transnational Organized Crime. <https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2016/04/Development-Responses-to-Organised-Crime.-An-analysis-and-programme-framework.pdf>.
- Timur, Fauzia Gustarina Cempaka, and Yanyan M. Yani. 2019. "FACING ISIS RETURNING FOREIGN TERRORIST FIGHTERS: INDONESIA PERSPECTIVE." *Jurnal Pertahanan* 5 (2): 38. <https://doi.org/10.33172/jp.v5i2.553>.
- Wibisono, A.A., and I Maulana. 2023. "Indonesia's Response to Returning Foreign Fighters: Network Affiliation as Basis for Risk Assessment." *Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism* 18 (1): 122–34. <https://doi.org/10.1080/18335330.2022.2037690>.
- Yilmaz, Ihsan, Nicholas Morieson, and Hasnan Bachtar. 2022. "Civilizational Populism in Indonesia: The Case of Front Pembela Islam (FPI)." *Religions* 13 (12): 1208. <https://doi.org/10.3390/rel13121208>.
- Zuhri, Syaifudin. 2021. "Regimented Islamophobia : Islam, State, and Governmentality in Indonesia." *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)* 9 (2): 387. <https://doi.org/10.21043/qijis.v9i2.8249>.